

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami proses pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat, dalam mencapai suatu kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung dan adanya pemerataan pendapatan di masyarakat.<sup>2</sup> Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi dihitung dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan suatu negara. Pada pembangunan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing serta pendukung jalannya pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin yang disebabkan oleh banyaknya pengangguran. Tingginya angka pengangguran dapat membawa bangsa berada pada kehancuran yang sulit dihindarkan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang

---

<sup>2</sup> Syahrina Syam, Abdul Wahab. “*Pengaruh upah dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di kota Makassar*”. Jurnal Iqtisaduna, Vol.1, No.1 (1 Juni 2015), hlm. 36

dinyatakan dalam persen.<sup>3</sup> Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunkan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Masalah pengangguran dalam hal ini adalah keadaan terkendalinya pemenuhan hak atas kesejahteraan dan hak atas pekerjaan. Tingkat Pengangguran adalah suatu kondisi dimana seseorang sudah tergolong angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan.<sup>4</sup> Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Keadaan ini disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*) mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula terwujud sebagai akibat dari lesunya kegiatan perekonomian yang membawa kegiatan yang menurunnya produksi di berbagai bidang karena pengurangan tenaga kerja.<sup>5</sup>

Dampak buruk pengangguran pada bidang perekonomian: *Pertama*, masyarakat tidak bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimum. Dikarenakan, apabila terdapat pengangguran maka pendapatan riil masyarakat lebih rendah dari pada pendapatan potensialnya sehingga rendah pula tingkat kemakmurannya. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan.

---

<sup>3</sup> Muhammad Nurholes, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2014". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 1, (Juni, 2014)

<sup>4</sup> Juliyanti maria marpaung, "Pengaruh migrasi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di kota pecan baru tahun 2000-2014". *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1, hlm. 408

<sup>5</sup> Moh. Faizin, "Buku Ajar Ekonomi Makro Islam", hlm. 147

*Kedua*, ini mengurangi pendapatan nasional dari departemen perpajakan. Akibat tingkat pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. Sebab, penerimaan pajak yang diterima dari masyarakat juga berkurang. Apabila penerimaan pajak berkurang maka uang yang dipakai untuk kegiatan ekonomi pemerintah akan berkurang, sehingga pembangunan akan terus berkurang. *Ketiga*, pertumbuhan di sektor ekonomi tidak mampu di galakkan. Akibat adanya pengangguran secara signifikan terhadap kemampuan daya beli masyarakat, maka akan berkurangnya permintaan terhadap barang-barang produksi dan jasa. Dimana kondisi ini tidak dapat merangsang kalangan investor untuk melakukan pendirian industri baru dan perluasannya. Maka, akan berakibat pada menurunnya tingkat investasi sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup>

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang termasuk ke dalam 8 besar tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur saat ini. Meningkatnya pengangguran ini akibat dampak dari pandemi *Covid-19* beberapa waktu lalu. Secara global pandemi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun saat ini memasuki masa pemulihan ekonomi, tapi dampaknya terhadap angka pengangguran masih belum terlihat. Di bawah ini merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka Se Eks Karesidenan Kediri Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 174

**Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022**

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Tulungagung	2,61	3,36	4,61	4,91	6,65
Kabupaten Kediri	4,15	3,58	5,24	5,15	6,83
Kota Kediri	3,56	4,15	6,21	6,37	4,38
Kabupaten Nganjuk	2,6	3,16	4,8	4,98	4,74
Kabupaten Trenggalek	4,12	3,36	4,11	3,53	5,37
Kabupaten Blitar	3,38	3,05	3,82	3,66	5,45
Kota Blitar	3,98	4,54	6,68	6,61	5,39

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tulungagung, 2022

Bedasarkan pada tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung lah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mengurangi tingkat pengangguran bukanlah hal yang mudah dijalankan. Banyaknya tingkat pengangguran yang melatar belakangi tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung adalah Upah dan Jumlah Penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, upah minimum adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Untuk itu yang mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja. Kunci penting dari suatu hubungan kerja adalah upah, upah merupakan imbalan yang diberikan oleh penyedia lapangan kerja kepada tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja. Adanya penerapan upah yang merata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial. Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan

minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik tenaga kerja itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, bahwa upah minimum regional, sektoral regional, maupun subsektoral meskipun saat ini upah minimum regional yang berlaku atau yang dimiliki oleh setiap daerah.

Di negara kita, Indonesia memiliki karakteristik pasar tenaga kerja yang tidak seimbang di mana jumlah penawaran lebih tinggi dari pada permintaan, alhasil upah tenaga kerja terutama bagi tenaga kerja yang memiliki pendidikan lebih rendah dan keterampilan seadanya cenderung mendapat lebih rendah. Sedangkan bagi tenaga kerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan keterampilan yang lebih memadai justru cenderung kearah sebaliknya. Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa pemerintah kita menerapkan kebijakan upah minimum sebagai *safety net* (jaring pengaman) dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari golongan penerima upah terendah. Penerapan kebijakan upah minimum dituangkan dalam seperangkat peraturan yang mengatur upah minimum serta tata cara dalam mekanisme dalam menetapkan upah minimum.<sup>7</sup> Pendapatan perkapita yang tinggi sama sekali bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah yang besar.

---

<sup>7</sup> Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, Farid Wajdi. “Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja”, Malang: Ahlimedia Press, (Februari 2022), hlm. 26 - 27

Hal ini mengingat besar kecilnya porsi atau bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok-kelompok penduduk yang paling miskin tidak sama untuk masing-masing negara, sehingga mungkin saja suatu negara dengan pendapatan perkapita yang tinggi justru mempunyai presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan internasional yang lebih besar dibandingkan dengan suatu negara yang pendapatan perkapita lebih rendah. faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain struktur pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara yang bersangkutan, berbagai peraturan politik dan kelembagaan yang dalam praktiknya ikut menentukan pola-pola distribusi pendapatan nasional.<sup>8</sup>

Dalam penentuan tingkat upah harus sesuai dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan).<sup>9</sup>

Selain faktor upah, faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas penduduk serta peningkatan sumber daya pangan akan menjadikan kemiskinan semakin meningkat. Adanya jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sejumlah manusia yang menempati suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan (*income per capita*) negara tersebut,

---

<sup>8</sup> Eman, dkk. “*Perekonomian Indonesia*”, Bandung: Media Sains Indonesia, (November 2021), hlm. 168-169

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yang secara kasar mencerminkan kemajuan negara tersebut. Jumlah penduduk yang pertahunnya akan mengalami peningkatan diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat juga akan meningkatkan pengangguran, apabila tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan.

Untuk itu peran pemerintah Kabupaten Tulungagung sangat diperlukan untuk mengupayakan mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengurangi pengangguran dan memenuhi kebutuhan dan peningkatan kualitas dan loyalitas sumber daya manusia adalah dengan melalui pelatihan yang berkesinambungan. Berbagai jenis pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga sebagai sarana mempersiapkan masyarakat untuk bersaing di era globalisasi dimana akan banyak pesaing kompeten dalam perekonomian.

SDM merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah SWT yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Jatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ  
يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi orang-orang yang berpikir”*.

Sumber daya yang ada harus dikelola dengan benar karena itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik, ilmu sangatlah diperlukan untuk menompang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tulungagung Dalam Prespektif Ekonomi Islam”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka selanjutnya perlu diadakan identifikasi masalah penelitian sehingga penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang cukup jelas. Berikut identifikasi dalam penelitian yaitu:

1. Apakah upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana pengaruh upah minimum dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana analisis Prespektif Ekonomi Islam tentang upah minimum, jumlah penduduk dan pengangguran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk mengetahui analisis Prespektif Ekonomi Islam tentang upah minimum, jumlah penduduk dan pengangguran.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah:

## **1. Secara Teoritis**

Bahwa hasil dari penelitian dapat bermanfaat dan dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khazanah keilmuan terutama di bidang upah minimum dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif ekonomi islam.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Lembaga**

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi atau pemikiran atas problem yang ada khususnya masalah tingkat pertumbuhan penduduk serta masalah pengangguran yang masih terbilang banyak, dan memberikan ruang untuk bekerja bagi tenaga kerja di sebuah unit usaha.

### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai upah minimum dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif ekonomi islam.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta dapat dijadikan referensi mengenai upah minimum dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif ekonomi islam.

## **E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan yang memudahkan peneliti agar lebih efektif dan efisien dengan tujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dari tema yang dikaji. Adapun variabel yang diteliti berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Dalam variabel bebas meliputi, upah minimum ( $X_1$ ) dan jumlah penduduk ( $X_2$ ), sedangkan variabel terkaitnya yaitu tingkat pengangguran (Y).

### **2. Keterbatasan Penelitian**

- a. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga dan kemampuan penelitian.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yang mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu: upah minimum dan jumlah penduduk.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dalam sebuah penelitian diperlukan agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami skripsi ini. Penegasan istilah yang berkaitan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

### **1. Definisi Konseptual**

- a. Pengaruh merupakan sumberdaya yang dapat membentuk mengubah sesuatu yang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online atau datring (dalam jaringan), diakses pada tanggal 25 Januari 2023, jam 09.00 WIB

- b. Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral.<sup>11</sup>
- c. Jumlah penduduk adalah penduduk atau warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>
- d. Pengangguran terbuka adalah suatu kondisi dimana seseorang yang sudah tergolong angkatan kerja belum mendapat pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan.<sup>13</sup>
- e. Ekonomi Islam, Menurut Chapre ekonomi islam adalah sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumberdaya langka seirama dengan tujuan-tujuan Syariah tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud adalah “Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Tulungagung Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

---

<sup>11</sup> Fuad Ikhsan, “*Dasar - Dasar Kependidikan*”, cetakan ketiga, (Jakarta: Reneka Cipta, 2003), hlm. 22

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, “*Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Interen Pada Pemerintah Daerah*”, Jurnal JOM Fekon Vol. 4 No. 1, (Februari, 2017), hlm. 886

<sup>13</sup> Juliyanti Maria Marpaung, “*Pengaruh Migrasi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pecan Baru Tahun 2000-2014*”, Jurnal JOM Fekon Vol. 4 No. 1, (1 Februari 2017), hlm. 408

<sup>14</sup> Imanudin Yuliadi, “*Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar, Lembaga Pengajian Dan Pengalaman Islam (LPPI)*”, (Yogyakarta, 2021), hlm. 7

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang gambaran dari sisi proposal dengan komperensif dan sistematis, yang meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah peneliti dalam mengambil sebuah penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai semua teori variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Di bab ini dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, juga berisi sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, serta analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan gambaran umum Kabupaten Tulungagung juga membahas pengujian hipotesis penelitian.

**BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup pengaruh upah minimum, jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung, dan analisis prespektif ekonomi islam mengenai upah minimum, jumlah penduduk dan pengangguran.

**BAB VI PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan serta saran yang relevan, pada bagian akhir laporan terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, data informasi penunjang penelitian, surat-surat dan daftar riwayat hidup peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**